

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimal sehingga dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri Arza dan Ramayani(2016). Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang bersifat *people centered, empowering, and sustainable* Saputro dan Susilo (2016). Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan dan mendukung masyarakat terlibat dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha yang memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia karena sektor UMKM terbukti dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan mempertinggi taraf hidup dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pada umumnya.

UMKM merupakan salah satu usaha yang mampu bertahan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, hal ini terbukti pada pasca krisis tahun 1997. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Wirjono dan Raharjono (2012), yang menyatakan bahwa UMKM dipandang sebagai katub penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Potensi besar yang dimiliki UMKM diharapkan

dapat mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM yang dikelola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan mewujudkan sektor usaha yang tangguh, sektor UMKM yang tangguh harus didukung dengan administrasi yang baik. Salah satu permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM adalah masalah administrasi yang terkait dengan pencatatan keuangan dalam usahanya.

Akuntansi berperan penting dalam kemajuan UMKM, karena dengan pencatatan akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan maka dapat membantu usaha kecil dalam pengambilan keputusan yang tepat, mempermudah dalam memperoleh kredit dari kreditur serta dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik UMKM atau pimpinan perusahaan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan bukan dengan berdasarkan asumsi semata Irman dan Azani (2015). Beberapa faktor yang menyebabkan para UMKM di Kabupaten Pasuruan tidak menerapkan pencatatan akuntansi yang memadai adalah karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan mereka beranggapan bahwa proses pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan adalah proses yang sulit dan berbelit.

Melihat pentingnya akuntansi bagi pelaku UMKM, maka IAI selaku organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Pada tahun 2009 DSAK telah mengesahkan SAK ETAP (Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik) dan standar ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Namun, standar ini masih dirasa sulit untuk diterapkan oleh pelaku UMKM sehingga IAI menyiapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Diharapkan dengan adanya SAK EMKM perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelapor keuangan entitas mikro, kecil dan menengah, SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur SAK ETAP. Menurut IAI (2017:9), SAK EMKM diharapkan dapat membantu sekitar 62,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih mudah untuk digunakan oleh para pelaku UMKM karena jauh lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP.

SAK EMKM ditunjuk untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Dalam SAK EMKM laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah serta menggunakan konsep entitas bisnis,

penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyesuaikan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat disusun melalui beberapa cara yaitu melalui persamaan dasar akuntansi, melalui siklus akuntansi dan melalui komputerisasi akuntansi. Pertama, penyusunan laporan keuangan melalui persamaan dasar akuntansi maksudnya adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan data keuangan yang terdapat pada daftar persamaan akuntansi yang telah dibuat. Kedua, penyusunan laporan keuangan melalui siklus akuntansi maksudnya adalah menyusun laporan keuangan melalui tahapan-tahapan yang terdapat dalam siklus mulai dari menganalisis bukti transaksi sampai dengan tersusunnya laporan keuangan. Yang terakhir, penyusunan laporan keuangan melalui komputerisasi komputer dan *software* akuntansi seperti MYOB, Accurate, Zahir Accounting dan lain-lain. Ketiga cara penyusunan laporan keuangan diatas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Menurut Dewan Standar Akuntansi. Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia bahwa laporan keuangan entitas terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Mengingat hal ini baru maka belum bisa dipastikan apakah UMKM sudah menerapkan sistem ini atau belum.

Menurut januaristie *et al* (2020) kesulitan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah melakukan pencatatan yang sistematis terhadap operasional perusahaanya. Masih banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran, tanpa

memperhatikan pengeluaran tersebut untuk pengalokasian kegiatan usaha ataupun non usaha.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erdha (2021), dengan hasil penelitian menunjukkan pengaruh persepsi atas penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan berstandar SAK EMKM, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia (2019), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh persepsi atas penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan berstandar SAK EMKM.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibnu Satiya, Nurzi Sabrina dan Erly Mulyani (2020) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi dan skala usaha mikro kecil dan menengah terhadap penyusunan laporan keuangan SAK EMKM. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK EMKM, sedangkan skala usaha tidak memberikan pengaruh.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005: 32). Persepsi wajib pajak terhadap kompleksitas aturan pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib pajak. Adanya aturan pajak yang selalu dinamis menjadikan wajib pajak harus selalu mengikuti dan menyesuaikan aturan yang ada. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak

perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Tingkat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah usaha di Indonesia Yusro (2014).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut merupakan salah satu faktor pemahaman fungsi perpajakan yang masih sangat kurang (Jatmiko, 2006). Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010: 141). Pentingnya pemahaman pajak oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Ananda, 2015). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Ardiasa, 2013).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penelitian tentang kepatuhan pajak dihasilkan oleh Driciyani (2016); Oktaviani (2016); Mustofa (2016.); Ananda, dkk (2015); Suyanto (2016); dan Mir'atusho li hah *et al.* (2014) menemukan bahwa kepatuhan pajak pelaku umkm berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan berstandar SAK EMKM. Sedangkan hasil sebaliknya oleh Pranadata (2014) menemukan bahwa kepatuhan pajak pelaku umkm tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan berstandar SAK EMKM.

Dari uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Persepsi Atas Penyajian Laporan Keuangan, Pengetahuan Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Kecenderungan Menyusun Laporan Keuangan Berstandar SAK EMKM”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Persepsi Atas Penyajian Laporan Keuangan, Pengetahuan Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Kecenderungan Menyusun Laporan Keuangan Berstandar SAK EMKM.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan sebagai berikut :

1. Apakah persepsi atas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar SAK EMKM?

2. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar SAK EMKM?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berpengaruh terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar EMKM?

1.4. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian ini untuk mengetahui persepsi atas penyajian laporan keuangan, pengetahuan akuntansi dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar SAK EMKM.

- a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi atas penyajian laporan keuangan terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar SAK EMKM.
- b. Untuk pengaruh pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar SAK EMKM.
- c. Untuk pengaruh kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berpengaruh terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar EMKM.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak.

a) Manfaat Akademi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman teori di bidang akuntansi di UKAW.

b) Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini adalah sebagai sarana pembelajaran terhadap penelitian di bidang ilmiah serta menambah pengetahuan didalam bidang perpajakan khususnya berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, pengetahuan akuntansi dan kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap kecenderungan menyusun laporan keuangan berstandar SAK EMKM.